# BAB I PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Suriah (Syria), secara resmi Republik Arab Suriah, adalah sebuah negara di Asia Barat. Sebelah barat berbatasan dengan Lebanon dan Laut Mediterania. Utara berbatasan dengan Turki. Timur berbatasan dengan Irak. Barat daya berbatasan dengan Yordania selatan, dan Israel. Ibu kotanya Damaskus adalah salah satu kota tertua terus dihuni di dunia.

Sebuah negara dataran subur, pegunungan tinggi, dan padang pasir tersebut adalah negara bagi berbagai etnis dan agama yang beragam, diantaranya Alawite, Sunni dan Kristen Arab, Armenia, Assyria, Druze, Kurdi, dan Turki. Muslim Arab Sunni merupakan kelompok penduduk terbesar (mayoritas) di Suriah.

Negara Suriah modern didirikan setelah Perang Dunia I sebagai mandat Perancis. April tahun 1946, Suriah merdeka sebagai sebuah negara republik parlementer. Pasca kemerdekaan itu, Suriah mengalami kekacauan yang sebagian besar disebabkan oleh upaya kudeta, pada periode 1949-1971. Suriah juga pernah terlibat dalam Perang Arab-Israel pada tahun 1948, bersama negara-negara Arab lainnya berusaha untuk mencegah pembentukan Negara Israel.

Sejak Maret 2011, Suriah telah terlibat dalam perang saudara. Perang sipil Suriah yang sedang berlangsung hingga saat ini, terinspirasi oleh revolosi Arab Spring.

Suriah merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Barat yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad dan pada saat ini sedang mengalami konflik bersenjata internal. Pada tanggal 26 Januari 2011 terjadi demonstrasi publik Suriah dan berkembang menjadi pemberontakan nasional. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, penggulingan pemerintahannya dan mengakhiri hampir lima dekade pemerintahan Partai Ba'ath. Pemerintah Suriah mengerahkan Tentara Nasional Suriah untuk memadamkan pemberontakan tersebut.

Pada awal tahun 2011 aksi-aksi demo mulai bermunculan secara terus menerus di Suriah, Rakyat Suriah mulai menyuarakan tuntutannya untuk menghentikan rezim Bashar Al-Assad. Aksi demo ini dibubarkan oleh tentara Suriah dan mengakibatkan ditahannya beberapa demonstran. Bentrokan antara demonstran dan tentara Suriah pun semakin sering terjadi. Pemerintah Suriah pun tak segan-segan untuk menggunakan senjata api bahkan tank untuk merepresif rakyat dan membungkam gerakan protes tersebut. Aksi represif ini dahulu merupakan cara yang efektif untuk membungkam rakyat Suriah, namun dimasa sekarang ini hanya memicu terjadinya demonstrasi-demonstrasi lain yang lebih dahsyat. Aksi protes ini menuntut penghentian Rezim Bashar Al-Assad yang dianggap sebagai diktator, diterapkannnya sistem multipartai dan kebebasan yang lebih bagi rakyat, dan juga pemberhentian undang-undang darurat yang telah diterapkan sejak 1963. Meski telah dilakukan upaya-upaya reformasi oleh Presiden Bashar Al-Assad, namun hal itu dianggap tidak cukup dan terlambat. Kini rakyat Suriah hanya menginginkan penggulingan rezim Bashar Al-Assad dan pengangkatan pemerintah yang sama sekali baru berdasarkan pemilu yang demokratis. Kebrutalan rezim Assad pun semakin menjadi-jadi, anak-anak pun saat ini menjadi target kejahatan tentara-tentara Assad. Sejak bulan Januari 2011 lalu rezim Assad telah melancarkan operasi biadab dan serangan dahsyatnya terhadap rakyat Suriah. Masyarakat digempur dengan tank-tank, bom mortir dan tembakan dari pesawat terbang. Ribuan penduduk yang tidak berdosa, tanpa senjata, dibunuhi di rumah-rumah mereka. Organisasi-organisasi kemanusiaan mengatakan, sekarang jumlah korban yang dibunuh lebih dari 70.000 orang. Namun, diperkirakan jumlahnya lebih besar dari itu.[[1]](#footnote-2)

Menurut pemerintah Suriah bahwa aksi demonstrasi yang terjadi di Suriah merupakan suatu aksi-aksi pengacau keamanan di Suriah yang didalangi oleh motif tertentu. Namun hal tersebut tidak terbukti kebenarannya sampai sekarang ini karena hal tersebut merupakan suatu opini publik yang dibuat oleh pemerintah Suriah untuk mengalihkan isu yang sebenarnya dari konflik yang terjadi di Suriah.

Dengan berjalannya waktu, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Suriah akhirnya berkembang menjadi suatu pemberontakan nasional. Aksi pemberontakan nasional tersebut terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan dengan sistem pemerintahan Presiden Bashar al-Assad selama ini dan juga keinginan dari rakyat Suriah untuk melakukan revolusi di Suriah. Aksi pemberontakan nasional tersebut akhirnya berujung pada terjadinya konflik bersenjata internal di Suriah.

Dengan adanya bentrokan yang terjadi terus menerus antara para demonstran dengan pemerintah Suriah tersebut membuat rakyat Suriah semakin memberontak dan melawan pemerintah Suriah. Hal ini menyebabkan rakyat Suriah mulai mengangkat senjata dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah Suriah. Aksi perlawanan dari Rakyat Suriah pun sangat beragam, mulai dari secara individu maupun kelompok. Namun sering kali pertempuran dimenangkan oleh pasukan pemerintah Suriah. Hal ini disebabkan karena perlawanan rakyat Suriah cenderung masih bersifat individual dan tidak terorganisir dengan baik secara strategi dan operasi militernya. Berdasarkan hal tersebut membuat rakyat Suriah akhirnya merasa perlu untuk membentuk suatu kekuatan oposisi yang mampu menandingi kekuatan pasukan tentara Suriah. Oleh karena itu pada tanggal 29 Juli 2011 dalam sebuah video yang dirilis di internet oleh sekelompok desertir berseragam dari militer Suriah yang membelot dan para kelompok-kelompok pemberontak kecil serta penduduk sipil yang turut mengangkat senjata bergabung dalam suatu organisasi yang dibentuk bersama oleh mereka dengan nama Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army* (FSA).[[2]](#footnote-3)*Free Syrian Army* (FSA) adalah struktur oposisi utama bersenjata yang beroperasi di Suriah yang telah aktif selama perang saudara di Suriah yang terdiri dari para personel angkatan bersenjata Suriah yang membelot dan relawan. Tentara Pembebasan Suriah (FSA) tidak memiliki tujuan politik kecuali untuk melengserkan Bashar al-Assad sebagai Presiden Suriah.

Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah merupakan konflik bersenjata internal. Dalam Hukum Humaniter Internasional, suatu konflik bersenjata digolongkan menjadi dua macam yaitu konflik bersenjata internasional (*International Armed Conflict*) dan konflik bersenjata non internasional (*Non-International Armed Conflict*). Konflik bersenjata internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi antar negara *dan CAR Conflict* (*Colonial Domination, Alien Occupation, dan Racist Regimes*).[[3]](#footnote-4) Konflik bersenjata non-internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara kelompok bersenjata yang bukan merupakan bagian dari angkatan bersenjata negara tersebut bertikai dengan pemerintah pusat negara itu. Selain itu juga Konflik bersenjata non internasional dapat terjadi karena adanya pertikaian antara faksi-faksi di suatu Negara. Dengan adanya penggolongan macam-macam konflik tersebut maka Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah merupakan konflik bersenjata noninternasional karena Konflik bersenjata internal di Suriah tersebut melibatkan antara pemerintah Suriah dengan para pemberontak yang menamakan kelompok organisasinya dengan nama Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army* (FSA).

*International Committee of the Red Cross* (ICRC), secara resmi menyatakan bahwa konflik berdarah yang terjadi di Suriah merupakan perang saudara. "Kita sekarang membicarakan konflik bersenjata non-internasional di negara ini (Suriah)," kata juru bicara ICRC Hicham Hassan.4 Status yang diumumkan Palang Merah Internasional pada hari Minggu tanggal 15 juli 2012 tersebut, memberi implikasi akan adanya tuntutan kejahatan perang pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pernyataan ICRC muncul ketika tim pemantau PBB mengumpulkan detail baru tentang apa yang terjadi di Desa Treimseh yang disebut kelompok oposisi sebagai , pembantaian oleh tentara rezim Presiden Bashar al-Assad.

Konflik yang terus terjadi di Suriah menyebabkan banyak warga Suriah yang meninggalkan negaranya dan mengungsi ke negara-negara lain seperti Turki, Lebanon, Yordania, dan negara-negara Uni Eropa.[[4]](#footnote-5)

Uni Eropa (UE) menjadi wilayah tujuan pengungsi dari Mediternia Selatan dikarenakan beberapa hal. Pertama karena kedekatan geografis. Kedua wilayah tersebut hanya dibatasi oleh laut Mediterania, sehingga hanya menggunakan kapal para pengungsi Mediterania Selatan dapat mencapai kawasan Eropa. Selain alasan geografis, perekonomian yang baik, juga menjadi alasan UE dipilih sebagai tempat tujuan para pengungsi. Italia, Yunani dan Malta, merupakan negara dekat pantai yang mudah dicapai, sehingga menjadi pintu masuk bagi pengungsi untuk menuju negara kaya di Eropa seperti Jerman, Inggris, dan Prancis. Berdasarkan data Frontex berikut jalur yang dilalui para pengungsi untuk memasuki wilayah Uni Eropa: Sebagian besar pengungsi Suriah menggunakan transportasi darat seperti bus dan mobil untuk mencapai Yunani melalui Turki. Setelah mencapai Eropa atau Yunani pengungsi Suriah melanjutkan ke negara Swedia dan Jerman. Pengungsi Mesir, memilih melalui jalur laut, dengan mengunakan kapal -kapal kecil mereka menyeberangi laut Mediterania menuju Yunani. Setelah mencapai Eropa atau Yunani pengungsi Mesir melanjutkan ke negara Prancis dan Inggris. Pengungsi Libya dan Tunisia, mengunakan jalur laut untuk mencapai Italia. Menggunakan kapal para pengungsi mengarungi Laut Mediterania sehingga mencapai pulau Lampedusa dan melanjutkan ke Prancis. Kedatangan para pengungsi Mediterania Selatan Di Uni Eropa mendapatkan bermacam-macam tanggapan dari negara-negara Uni Eropa.

Uni Eropa terdiri dari 28 negara tersebut memiliki peraturan pengungsi yang berbeda.[[5]](#footnote-6) Sehingga perlakuan dan cara penerimaan para pengungsi di setiap negara Uni Eropa itupun berbeda. Kedatangan pengungsi ini berdampak negatif dan positif bagi negara-negara UE yang dituju oleh para pengungsi. Terutama negara-negara Uni Eropa yang berada di kawasan pantai yang lebih mudah dicapai pengungsi, jelas lebih banyak pengungsi yang datang dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa yang lain.

Jerman sebagai negara yang dirasa cukup menerima kedatangan para imigran menyatakan bahwa Wakil kanselir Jerman Sigmar Gabriel menyampaikan bahwa arus deras kedatanganimigran Timur Tengah ke Jerman bukan menjadi persoalan bagi kapasitas negaranya. Sebab negara ini mengaku telah menyediakan kapasitas penampungan hingga 500 ribu orang per tahun. Kesediaan negara ini dalam menampung para pengungsi tidak terlepas dari rasa simpati terhadap kondisi negara-negara yang tengah dilanda perang, terutama Suriah dan Hungaria. Pemerhati masalah sosial di Bonn, Berthold Damshauser menyampaikan bahwa penanganan yang tidak baik terhadap imigran juga menjadi alasan bagi negaranya untuk membuka pintu bagi mereka. “Ada situasi di Hungaria dimana para pengungsi tidak ditangani dengan baik, sehingga pemerintah Jerman membuka jalan bagi mereka,” kata Damshauser.[[6]](#footnote-7)

Selain itu dirinya juga memandang bahwa keterbukaan ini didorong oleh pengalaman sakit yang sama ketika ribuan warga Jerman menjadi pengungsi di masa Perang Dunia II. “Jadi, Jerman pernah mengalami masalah pengungsi dan mungkin masih banyak orang yang ingat bagaimana sulitnya menjadi pengungsi. Selain itu, saya bisa mengatakan bahwa rasa kemanusiaan di masyarakat Jerman cukup tinggi. Ada empati yang besar terhadap orang-orang yang menderita. Ini fenomena yang menarik, yang menunjukkan kematangan dari masyarakat Jerman,” lanjutnya.

Seperti diketahui Jerman adalah salah satu negara yang terbuka menampung para pengungsi dari Timur Tengah. Negara ini menunjukkan sambutan yang hangat ketika puluhan ribu pengungsi, yang sebagian besar dari Suriah tiba di Jerman. Negara-negara lain yang juga membuka diri menampung pengungsi adalah Austria dan Amerika Serikat. Dan baru-baru ini, Australia mengumumkan kesediaan menampung sebanyak 12 ribu imigran yang melarikan diri dari negara Suriah setiap tahun. Perdana Menteri Australia, Tony Abott mengatakan Australia akan mengalokasikan kuota tahunan untuk membiayai 13.750 orang.

Selain alasan kemanusiaan, kesediaan Jerman menerima para imigran yaitu karena alasan ekonomi. Jerman yang termasuk negara G7 ini menyayangkan jika perekonomiannya menurun hanya karena alasan kurangnya sumber daya manusia.

Saat ini ratusan ribu lowongan pekerjaan untuk kalangan professional muda belum terisi sepenuhnya oleh penduduk Jerman. Jika ini terus dibiarkan, maka produktivitas negara Jerman akan menurun. Jerman saat ini menempati urutan ketiga negara pengekspor terbesar setelah Amerika Serikat dan China.[[7]](#footnote-8)

1. **Identifikasi Masalah**
2. Bagaimana peran pemerintahan Jerman dalam program bantuan luar negeri?
3. Bagaimana gelombang pengungsi Suriah dan kondisi pengungsi Suriah di Jerman?
4. Sejauh mana bantuan Jerman dalam penanganan permasalahan pengungsi Suriah di Jerman?
5. **Pembatasan Masalah**

Mengingat begitu luasnya konteks dalam permasalahan, maka penulis menitikberatkan pada “**Mengapa Jerman memberi bantuan pada pengungsi Suriah”**

1. **Perumusan Masalah**

Guna mempermudah dalam penganalisaan permasalahan tersebut yang berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Mengingat luasnya kajian dalam masalah ini, maka penulis mencoba merumuskan masalah untuk penelitian sebagai berikut :

**“Apakah bantuan yang diberikan Jerman terhadap pengungsi Suriah dapat memenuhi harapan pengungsi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu usaha memperdalam pemahaman dan pengetahuan akan suatu permasalahan dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dan metodelogis. Tujuan Penelitian berkaitan dengan penelaahan-penelaahan serta mengembangkan bidang yang diteliti. Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintahan Jerman dalam program bantuan luar negeri.
2. Untuk mengetahui bagaimana gelombang pengungsi Suriah dan kondisi pengungsi Suriah di Jerman.
3. Untuk mengetahui Sejauh mana bantuan Jerman dalam penanganan permasalahan pengungsi Suriah di Jerman.
4. **Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan komperatif bagi penelitian yang sejenis, dan aspek-aspek yang belum terungkap di dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut, baik bagi pembaca umum maupun penstudi Hubungan Internasional lainnya pada khususnya.
2. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang imigran serta pengaruhnya terhadap dinamika sosial di Negara Perancis.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi nilai Praktikum Hubungan Internasional Universitas Pasundan.
4. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
5. **Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan sumber landasan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Penulis menggunakan kerangka pemikiran guna membantu dalam memahami dan menganalisa permasalahan yang berlandaskan teori-teori hubungan internasional dari pakar yang kompeten yang tentunya sesuai dengan masalah yang diteliti.

Teori Hubungan Internasional adalah seperangkat hipotesis yang mengasumsikan hubungan antarvariabel atau antarkondisi yang digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, atau memprediksikan suatu fenomena; atau menyarankan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan atau prinsip tertentu. Dalam studi hubungan internasional, teori berfungsi sebagai piranti untuk menganalisis fenomena politik internasional. Teori hubungan internasional dibangun melalui serangkaian perdebatan dan sangat dipengaruhi oleh peristiwa sejarah serta isu-isu di bidang politik dan ekonomi yang mengemuka pada kurun waktu tertentu.[[8]](#footnote-9)

Kepentingan Nasional adalah konsep yang digunakan secara luas dalam hubungan internasional dan sering diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh negara di bidang militer, ekonomi, maupun budaya. Tujuan tersebut menjadi acuan negara dalam berinteraksi dengan actor lain. Kepentingan nasional dapat dilihat dari tiga perspekftif yaitu: (a) sebagai piranti analisis untuk mengkaji preferensi politik luar negeri suatu negara; (b) sebagai criteria untuk mengevaluasi kebijakan atau tindakan tertentu; (c) sebagai justifikasi terhadap kebijakan luar negeri. Teori *realism* melihat kepentingan nasional sebagai salah satu elemen terpenting dalam hubungan internasional. *Realism* melihat kelangsungan hidup atau survival sebagai aspek terpenting yang harus diperjuangkan oleh negara lain dan tujuan lain seperti kemakmuran ekonomi, harus dijadikan pendukung untuk mempertahankan kelangsungan hidup tersebut.[[9]](#footnote-10)

Pengertian Theodore A. Coloumbus dan James H. Wolfe mengemukakan sebagai berikut:

Teori adalah sekumpulan generasi empiris yang secara konsisten dan memiliki kemampuan yang bersifat deskriptif (menerangkan), prediktif (meramalkan), eksplanatori (menjelaskan).[[10]](#footnote-11)

Sedangkan yang dimaksud dengan konsep adalah suatu abstraksi atau generalisasi yang dapat membantu kita menata pengetahuan untuk tujuan penyelidikan yang bersifat teoritis. Beberapa konsep dasar dibidang politik, adalah keadilan, kekuasaan, kebebasan, kepentingan, persamaan, keamanan, konflik, perdamaian dan partispasi.[[11]](#footnote-12)

Studi hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara aktor-aktor di dunia. Aktor dari interaksi ini menurut pendekatan realisme hanya negara (*state*), namun menurut pendekatan pluralisme aktor tidak hanya negara tetapi ada aktor di luar negera (*non-state*) seperti organisasi dan perusahaan-perusahaan multinasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai definisi hubungan internasional menurut K.J. Holsti dalam bukunya Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis yaitu sebagai berikut:

**Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Hubungan internasional mencangkup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara sebagai negara didunia.**[[12]](#footnote-13)

Adapun istilah Hubungan Internasional menurut Theodore A. Coloumbus dan James H. Wolfe dalam buku yang berjudul Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power yang diterjemahkan oleh Mercedes Marbun mendefinisikan pengertian hubungan internasional sebagai berikut:

**Suatu studi mengenai pola-pola aksi dan reaksi diantara negara-negara yang berdaulat yang diwakili oleh elit-elit pemerintahannya. Aktivitas-aktivitas diplomasi dan tentara yang melaksanakan politik luar negeri pemerintah negara-negara tersebut tidak lepas dari *balance of power* (perimbangan kekuatan), pencapaian kepentingan nasional, usaha untuk menemukan *world order* (keteraturan dan tata dunia) dan diplomasi yang *prudence* (hati-hati).**[[13]](#footnote-14)

Organisasi internasional sebagai sebuah aktor dalam hubungan internasional dan dikatakan sebagai wadah kerjasama internasional. Disamping itu, organisasi internasional memiliki anggota-anggota yang memberikan kontribusi yang besar bagi tujuan-tujuan, kepentingan-kepentingan bersama serta kegiatan-kegiatan yang hendak dilaksanakan. Organisasi internasional beserta dinamika Hubungan Internasional yang terjalin di dalamnya, mengalami eksistensi yang cukup kuat dewasa ini. Sangat penting untuk kita mengetahui apa yang dimaksud dengan Organisasi Internasional.

Organisasi internasional digambarkan sebagai pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berdasarkan atas status persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.[[14]](#footnote-15)

Dalam hal ini T. May Rudi menyatakan bahwa:

**Organisasi internasional merupakan salah satu aktor hubungan internasional yang terbentuk berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa negara (baik oleh agen pemerintah maupun non pemerintah) dengan tujuan tertentu. Organisasi internasional terbentuk karena adanya kebutuhan dari masyarakat internasional akan adanya wadah untuk melakukan kerjasama internasional.**[[15]](#footnote-16)

Pembentukan, tujuan dan kelangsungan hidup organisasi-organisasi internasional bergantung pada negara. Organisasi internasional secara umum dibedakan atas dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi internasional antar pemerintah (*inter governmental organization*) yang sering lazim disingkat menjadi IGO. Anggotanya adalah pemerintah atau wakil instansi yang mewakili pemerintahan suatu negara secara resmi. Kegiatan administrasinya diatur berlandaskan hukum publik.
2. Organisasi internasional non-pemerintah (n*on governmental organization*) yang sering juga lazim disingkat dengan peristilahan NGO atau INGO (*international non governmental organization*). Kegiatan administrasinya biasanya diatur berlandaskan pada hukum perdata.[[16]](#footnote-17)

Sesuai dengan yang dinyatakan oleh D. Krisna bahwa “hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara kedua pihak”.[[17]](#footnote-18)

Dalam pernyataan ini, dijelaskan bahwa hubungan bilateral terjalin dikarenakan adanya motif-motif kepentingan. Kata timbal balik menekankan pada adanya aksi reaksi dalam hubungan bilateral. Dalam konteks negara, hubungan timbal balik diartikan sebagai *win-win solution* dimana kepentingan masing-masing negara terpenuhi.

Dengan demikian, adanya saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya dalam rangka memenuhi serta mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya, maka memerlukan suatu kerjasama baik di tingkat regional maupun internasional. Pemahaman mengenai kerjasama internasional, dikemukakan oleh Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya Organisasi dan Administrasi Internasional. Adapun pengertian kerjasama internasional sebagai berikut:

**Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan sebuah keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensia dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena *national understanding* dimana kondisi internasional yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik.**[[18]](#footnote-19)

Kerjasama internasional itu sendiri terbagi atas empat bentuk, antara lain:[[19]](#footnote-20)

1. Kerjasama Global

Kerjasama yang memadukan semua bangsa di dunia dan mempersatukan seluruh cita-cita bersama serta untuk menghindari disintegrasi internasional.

1. Kerjasama regional

Kerjasama antara negara-negara yang secara geografis berdekatan dan memiliki kesamaan pandangan ekonomi, politik, sosial, budaya, dari negara-negara yang hendak bekerjasama tersebut.

1. Kerjasama fungsional

Kerjasama yang didasarkan pada fungsinya masing-masing, biasanya kerjasama ini meningkatkan bidang-bidang tertentu, misalnya ekonomi, politik, sosial budaya, dan lingkungan hidup.

1. Kerjasama ideologisKerjasama yang dilakukan negara-negara yang menganut paham ideologi yang sama, dan bentuk kerjasama biasanya diberlakukan melalui suatu perjanjian.

Kerjasama bisa berupa pemberian bantuan maupun saling memberikan bantuan hal ini bertujuan untuk mempererat rasa persaudaraan. Selain dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok tertentu, kerjasama juga dilakukan antar negara. Hal ini berkenaan dengan hubungan diplomatik untuk menjaga perdamaian dunia secara lebih global.

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrument kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri. Secara umum bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah lain dapat berbentuk barang atau dana. Menurut teori Pearson dan Payasilian dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional yang diterjemahkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani, yaitu[[20]](#footnote-21):

**Teori ketergantungan (dependensia) menyatakan bahwa bantuan luar negeri digunakan oleh negara kaya untuk mempengaruhi hubungan domestik dan luar negeri negara penerima bantuan, merangkul elit politik lokal di negara penerima bantuan untuk tujuan komersil dan keamanan nasional. Kemudian, melalui jaringan internasional, keuangan internasional dan struktur produksi, bantuan luar negeri ditujukan untuk mengeksploitasi sumber daya alam negara penerima bantuan. Sehingga, para penganut teori dependensia menganggap bahwa bantuan luar negeri dapat digunakan sebagai sebuah instrumen untuk perlindungan dan ekspansi negara kaya ke negara miskin, sebuah sistem untuk mengekalkan ketergantungan.**

Bantuan luar negeri dapat berupa pemberian (*grant)*, pinjaman luar negeri (*loan)* atau kerjasama teknik yang diberikan oleh negara-negara donor atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman luar negeri.

**Bantuan luar negeri adalah segala sesuatu yang berurusan dengan pemindahan sumber-sumber kebendaan material dan jasa-jasa dari negara tertentu terhadap negara lainnya yang memerlukannya dalam suatu ikatan transaksi berbentuk pinjaman, pemberian, dan penanaman modal asing.**[[21]](#footnote-22)

Terdapat dua syarat aliran modal dari luar negeri merupakan bantuan luar negeri, yaitu:[[22]](#footnote-23)

* + - 1. Aliran modal dari luar negeri tersebut bukan didorong untuk mencari keuntungan;
      2. Aliran modal dari luar negeri atau dana tersebut diberikan kepada negara penerima atau dipinjamkan dengan syarat yang lebih ringan daripada yang berlaku dalam pasar internasional.

Oleh sebab itu, aliran modal dari luar negeri yang tergolong sebagai bantuan luar negeri dapat berupa pemberian *(grant)* dan pinjaman luar negeri *(loan)* yang diberikan oleh negara-negara donor atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman luar negeri, seperti Bank Dunia *(World Bank,* Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank),* Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*).

Holsti membagi program bantuan luar negeri ke dalam empat jenis, yaitu:

1. Bantuan Militer;
2. Bantuan Teknik;
3. *Grant* dan program komoditi impor;
4. Pinjaman pembangunan.

Program bantuan luar negeri ini biasanya saling menguntungkan kedua pihak. Pihak penerima memperoleh pinjaman dana, perlengkapan, pengetahuan yang diharapkan mampu mengikuti dinamika ekonomi modern, stabilitas politik dan keamanan militer. Sedangkan pihak pemberi atau donor tanpa memperhitungkan jenis-jenis persyaratannya selalu mengharapkan keuntungan politik dan ekonomi baik langsung maupun jangka panjang, yang tidak bisa diperoleh sepenuhnya melalui diplomasi, propaganda atau kebijakan militer.[[23]](#footnote-24)

Migrasi Interasional menurut Khalid Koser :

***“There are more international migrants today than ever before, and their number is certain to increase for the foreseeable future. Almost every country on earth is, and will continue, to be affected. Migration is inextricably linked with other important global issues, including development, poverty, and human right. Migrants are often the most entrepreneurial and dynamic member of society; historically migrantion has underpinned economic growth and nation-building and enriched culture. Migration also presents significant challenges. Some migrants are exploited and their human right abused; integration in destination countries can be difficult; and migrantion can deprive origin countries of important skills. For all those reasons and more, migration matters”.[[24]](#footnote-25)***

Dalam migrasi Internasional terdapat teori *push and pull.* Yang merupakan hal yang melatar belakangi migrasi internasional. Dua faktor tersebut membentuk pembedaan sifat migrasi internasional menjadi dua, yaitu terpaksa (*forced*) dan sukarela (*voluntary*).[[25]](#footnote-26) Migrasi internasional terpaksa contohnya seperti migrasi yang dilakukan oleh pengungsi internasional (*refugee*) dan pencari suaka (*asylum seeker*). Sedangkan migrasi internasional sukarela contohnya adalah migrasi yang dilakukan buruh migran dan pelajar internasional.

Migrasi internasional dalam studi hubungan internasional dapat dijelaskan melalui kelompok teori non-state-centric, seperti yang disebutkan oleh Ray Kolslowski dalam bukunya yang berjudul International *Migration and the Globalization of Domestic Politics*.[[26]](#footnote-27) Teori *state-centic* juga memiliki kecenderugan mengesampingkan pentingnya migrasi internasional. Karena migrasi internasional dianggap dianggap hanya dapat mengubah politik domstik yang menggema ke politik internasional dalam bentuk kebijakan luar negeri yang sangat sedikit sekali kaitanya dengan kapabilitas militer dan lebih berkaitan dengan ekonomi.[[27]](#footnote-28) Walaupun begitu, teori state-centic telah mencoba untuk menjelaskan migrasi internasional dalam konteks keamanan nasional dan kerjasama antar negara.

Migrasi sebenarnya bukan fenomena baru. Sejak zaman dahulu, manusia sudah sering berpindah dari kampung halamannya ke daerah lain. Namun, di era globalisasi sekarang ini, fenomena migrasi menemukan bentuk yang berbeda, baik dari segi motif, skala, jarak maupun akibat yang ditimbulkannya. Tidak seperti di masa lalu dimana migrasi kebanyakan terjadi di dalam satu wilayah Negara, migrasi sekarang ini sudah melintasi batas territorial Negara, bahkan benua. Globalisasi meniscayakan adanya hubungan yang sangat integral antara satu masyarakat dengan yang lain yang diakibatkan oleh semakin kaburnya hambatan-hambatan jarak dan informasi.[[28]](#footnote-29)

Migran ekonomi adalah orang yang meninggalkan negara asalnya dan menetap di negara lain dengan motif utama untuk meningkatkan kesejahteraan. Istilah *economic migrant* digunakan untuk membedakan migran pada kategori ini dengan orang yang meninggalkan negara asalnya karena motif politik atau untuk menghindari ancaman. *Economic migrant*  juga sering digunakan untuk menyebut orang yang mencoba masuk ke suatu negara tanpa izin dengan alasan mencari suaka namun tujuan sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan.[[29]](#footnote-30)

Migrasi tenaga kerja adalah pergerakan manusia dari negara asal ke negara lain dengan motivasi utama untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Jumlah tenaga kerja yang melakukan migrasi antarnegara dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan semakin banyaknya negara dan kawasan yang memberlakukan rejim perdagangan bebas barang dan jasa. Selain merupakan bagian dari fenomena globalisasi, migrasi tenaga kerja juga dapat dilihat sebagai dampak dari tingginya kesenjangan ekonomi antara kelompok negara kaya dan kelompok negara miskin. [[30]](#footnote-31)

Imigrasi dalam jumlah besar dan berkelanjutan akan merubah komposisi demografis Negara penerima. Imigran yang awalnya datang sebagai pekerja atau pengungsi tidak mau kembali ke Negara asalnya. Mereka lebih memilih tetap tinggal di *host country* selepas kontrak kerja mereka selesai. Mereka yang tinggal dalam waktu lama, akan mendapatkan kewarganegaraan. Pada masa selanjutnya, warga Negara keturunan asing ini akan membentuk minoritas dengan jumlah signifikan yang rentan diskriminasi, terlebih jika mereka memiliki latar belakang politik dan cultural dengan Negara tempat tinggal.[[31]](#footnote-32)

Emigrasi adalah tindakan seseorang meninggalkan satu negara untuk menetap di negara lain. Norma internasional di bidang hak asasi manusia menyebutkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk meninggalkan negara mana pun termasuk negara asal mereka. Pembatasan pada hak individu untuk meninggalkan wilayahnya hanya dapat diterapkan pada situasi tertentu.[[32]](#footnote-33)

Dalam Teori Tindakan Rasionalitas Instrumental, Weber berpendapat bahwa sebuah tindakan sosial meliputi pertimbangan dan pilihan yang sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu selalu memiliki tujuan yang beragam dari setiap hal yang diinginkan, maka individu diuntut untuk memilih. Dan untuk memenuhi tujuan itu, individu harus memiliki alat yang mendukung.[[33]](#footnote-34)

Menurut Weber bahwa seseorang bisa membandingkan struktur beberapa masyarakat dengan memahami alasan-alasan mengapa masyarakat tersebut bertindak, kejadian-kejadian historis secara berurutan yang mempengaruhi karakter mereka, dan memahami tindakan pada pelakunya yang hidup pada masa kini, akan tetapi tidak mungkin mengeneralisasi semua masyarakat atau semua strruktur social.[[34]](#footnote-35)

1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka teoritis dan permasalahan di atas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**“Jika bantuan Jerman terhadap pengungsi Suriah berjalan dengan baik, maka kehidupan para pengungsi Suriah akan menjadi lebih baik”**

1. **Operasional Variabel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Variabel**  **(Teoritik)** | **Verifikasi**  **(Analisis)** |
| **Variabel Bebas:**  Program bantuan Jerman  **Variabel Terikat:**  Kaitannya dalam gelombang pengungsi Suriah | Jerman sebagai negara yang dirasa cukup menerima kedatangan para pengungsi Suriah tidak keberatan dengan kedatangan para pengungsi ke negaranya. Sejak konflik itu berlangsung hingga Juni 2015 Jerman telah menerima lebih dari 110.000 pengungsi.  Jurnal Europe Coucil 2003:434  Perang yang terjadi di Suriah sejak 2011 itu telah memakan banyak korban yang kebanyakan adalah warga sipil. Sebanyak kurang lebih 300.000 jiwa menjadi korban perang saudara tersebut. Kini rakyat Suriah mencari perlindungan ke negara-negara sekitar untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.  <http://www.dw.com> |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

Terjadi perang Saudara di Suriah pada 2011 yang menyebabkan lebih dari 300.000 jiwa tewas dan lainnya mencari suaka ke daerah sekitar.

Kedatangan para pengungsi di Uni Eropa mendapatkan bermacam-macam tanggapan dari negara-negara UE yang terdiri dari 28 negara memiliki peraturan pengungsi yang berbeda

Jerman, Inggris dan Perancis merupakan negara tujuan pengungsi.

- Dalam konvensi 1951 juga dijelaskan mengenai status hukum pengungsi dan mencantumkan ketetuan-ketentuan tentang hak mereka untuk mendapatkan keamanan, pekerjaan dan kesejahtraan.

Jerman dengan pengangguran terendah di Eropa yakni sebanyak 6,2 % dari jumlah rakyat sebanyak 81 juta jiwa sangat menyambut baik para pengungsi Suriah yang faktanya mereka merupakan kalangan terpelajar atau pekerja ahli seperti Dokter, Teknisi, Arsitek dll.

Dengan diterimanya pengungsi di Jerman dilihat dari segi ekonomi maka akan terjadiya simbiosis mutualisme anatara pengungsi dan Jerman.

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena yang ada dan membahas realita yang ada serta berkembang dewasa ini kendati yang setuju pada pencarian alternatif untuk membahas permasalahan yang dihadapi. Metode ini pada akhirnya akan dapat dikomparasikan dengan prediksi realita masa yang akan datang. Metode deskriptif analitis menggambarkan, mengklarifikasi, menelaah, serta menganalisis fenomena yang ada didasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dalam masalah yang bersifat actual di tengah realita yang ada untuk memecahkan masalah dalam prakteknya tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis dari interprestasi data-data tersebut.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data dari kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan penelaah literature atau referensi baik yang bersumber dari artikel-artikel, surat kabar, jurnal, internet maupun catatan-catatan penting mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. Perpustakaan Universitas Pasundan

Jalan Lengkong Besar No.68 Bandung

1. Perpustakaan Universitas Padjajaran

Jalan Raya Bandung-Sumedang Km 21 Jatinangor

**Jadwal Kegiatan Penelitian**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | **2015-2016** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bulan | Oktober | | November | | | | Desember | | | | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | |
| Minggu | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kegiatan |
| 1. | Tahap Persiapan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 1. Konsultasi Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengajuan Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pembuatan Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Seminar UP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Penelitian Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | 1. Pengurusan Surat Izin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengajuan Surat Penelitian ke Lapangan & Wawancara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pengolahan Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Analisa Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Tahap Akhir  Pelaporan  Persiapan & Draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Sistematika Penulisan**

BAB I : Menjelaskan latar belakang dari pengangkatan masalah.

BAB II : Membahas tinjauan umum mengenai Jerman dan bantuannya terhadap pengungi Suriah

BAB III : Membahas kondisi pengungsi Suriah

BAB IV : Efektifitas bantuan yang diberikan Jerman dalam membantu pengungsi Suriah

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dari penellitian.

1. Http://en.wikipedia.org/wiki/konfliksuriah, Internasional conflict, International Committee of The Red Cross, diakses 13 Des 2015 [↑](#footnote-ref-2)
2. Http://en.wikipedia.org/wiki/konfliksuriah, Landis, Joshua (29 juli 2011), Free Syrian Army Founded by Seven Officers to Fight the Syrian Army, hal. 1, diakses 13 Des 2015 [↑](#footnote-ref-3)
3. Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et all, 1991, Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of The Red Cross, Jakarta, hal. 133 diakses 13 Des 2015 [↑](#footnote-ref-4)
4. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/07/150709\_dunia\_suriah\_pengungsi [↑](#footnote-ref-5)
5. Jurnal Europe Coucil 2003:434 [↑](#footnote-ref-6)
6. *BBC Indonesia*, Selasa (8/9). [↑](#footnote-ref-7)
7. *Washingtonpost.com* [↑](#footnote-ref-8)
8. Khasan Ashari, *Kamus Hubungan Internasional,* Bandung: Nuansa Cendekia, 2015. Hal 258. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid. hal 307. [↑](#footnote-ref-10)
10. Theodore A. Coloumbus dan James H. Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional* (Terjemahan Mercedes Marbun) (Bandung, 2011), hlm. 30. [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid.*, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-12)
12. K.J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis* (Terjemahan Wawan Juwanda), Bandung: Bina Cipta, 1992, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-13)
13. Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power* (terjemahan Mercedes Marbun), Jakarta: Putra A. Bardin, hal 24. [↑](#footnote-ref-14)
14. Ade Maman Suherman, 2003, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Prespektif Hukum dan Globalisasi,* Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 49. [↑](#footnote-ref-15)
15. T. May Rudi, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 1998, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-16)
16. Teuku May Rudy, 2009, *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional,* Bandung: Angkasa, hal. 5 [↑](#footnote-ref-17)
17. Didi Krisna, 1993, *Kamus Politik Internasional,* Jakarta: Grasindo, Hal. 18. [↑](#footnote-ref-18)
18. Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi dan Administrasi Internasional*, Bandung : Fisip UNPAD Press, 1983, hlm. 83. [↑](#footnote-ref-19)
19. T. May Rudi, *Organisasi dan Administrasi internasional*, Bandung: P.T Eresco, 1993, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-20)
20. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Graha Ilmu, 2005), hlm. 81. [↑](#footnote-ref-21)
21. Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional 2,* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 189. [↑](#footnote-ref-22)
22. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Op cit,* hlm. 83. [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-24)
24. Khalid Koser, International Migration: A very Short Introduction, (New York: Oxport University Press, 2006), hal 1. [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid hal 17 [↑](#footnote-ref-26)
26. Ray Kalsowki, *International Migration and Globalzation of Domestic Poltics* (London: Routledge, 2005) hal 5 [↑](#footnote-ref-27)
27. Ibid hal 7 [↑](#footnote-ref-28)
28. Ahmad Muhammad, *Globalisasi dan Migrasi: Problematika Integrasi Imigran Turki ke dalam Masyarakat Jerman*, dalam <http://ahmad_m-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-67268-Umum-Globalisasi%20dan%20Migrasi:%20Problematika%20Integrasi%20Imigran%20Turki%20ke%20dalam%20Masyarakat%20Jerman.html> diakses pada 16 Oktober 2015 pukul 14.50. [↑](#footnote-ref-29)
29. Khasan Ashari, Op.Cit., hal. 169 [↑](#footnote-ref-30)
30. Ibid hal. 275 [↑](#footnote-ref-31)
31. Ahmad Muhammad, Loc.Cit. [↑](#footnote-ref-32)
32. Khasan Ashari, Op.Cit, hal. 173 [↑](#footnote-ref-33)
33. Nanda, Dikka, *Teori Tindakan Sosial dari max Webber,* http://catatanhardika.blogspot.co.id/2014/04/teori-tindakan-sosial-dari-max-webber.html, diakses pada 21 Oktober pukul 13.14 [↑](#footnote-ref-34)
34. Jones, Pip. *Pengantar Teori-teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm.115. [↑](#footnote-ref-35)